

BKN Gunakan Face Recognition pada Saat Tes Seleksi CPNS

JAKARTA (IM) - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menggunakan aplikasi face recognition untuk mencegah kecurangan dalam tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Hari Wibisana mengatakan, melalui aplikasi tersebut, diharapkan tidak ada lagi kecurangan peserta seleksi yang menggunakan jasa calo atau joki.

“Untuk yang sekarang ini tidak bisa lagi karena kami sudah menggunakan face recognition. Jadi itu bisa untuk menetralkan upaya-upaya untuk menggunakan joki dalam tes CPNS,” kata Bima dalam rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (24/3).

Aplikasi face recognition dapat melihat dan mencocokkan wajah peserta ujian. Dengan demikian praktik

kecurangan dengan menggunakan joki tidak akan terjadi lagi.

“Kalau dulu masih mungkin calo masuk walaupun sudah diperiksa macam-macam tapi masih ada kemungkinan dikerjakan oleh calo atau joki,” ujar Bima.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkapkan, praktik percaloan selalu muncul setiap tes penerimaan CPNS.

Menurut Tjahjo, masyarakat harus mewaspadai para calo yang bergentayangan agar tidak dirugikan dengan praktik yang mereka lakukan. Ia mencontohkan pada 2019 lalu, ada sekitar 10 orang yang mendatangi rumahnya karena mereka mendapat informasi akan diberikan SK khusus dari Tjahjo. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



MENKES TINJAU VAKSINASI COVID-19 PEKERJA BANDARA SOETTA

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) didampingi Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin (kanan) dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soetta Darmawali Handoko (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pekerja bandara di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (24/3). Menkes mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi pekerja bandara, terutama jelang pelaksanaan arus mudik Idul Fitri 2021 melalui bandara Soekarno Hatta.

Blokir Rekening FPI, Kewajiban PPATK atau Hanya karena Ikut-ikutan Saja?

Arsul membandingkan sikap PPATK terhadap kasus FPI dengan kasus Jiwasraya dan ASABRI. Tindakan PPATK justru tidak sama terhadap dua kasus tersebut.

JAKARTA (IM) - Tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memunculkan pemblokiran rekening FPI mendapat kritikan dari sejumlah anggota Komisi II DPR, saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Rabu (24/3).

Kritikan pertama datang dari anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada PPATK. Arsul mengkritik saat PPATK terlihat begitu semangat saat mengumumkan ke publik telah memblokir 92 rekening FPI.

Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi Arsul, apakah penyampaian kepada publik merupakan kewajiban hukum dari PPATK.

“Atau karena ikut-ikutan saja, karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah. Maka kemudian PPATK sebagai bagian atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan ikut merasa perlu juga untuk ikut-ikutan men-disclose banyak hal terkait FPI,” kata Arsul.

Arsul membandingkan sikap dan implementasi PPATK

terhadap FPI dengan kasus Jiwasraya dan ASABRI. Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, PPATK justru tidak melakukan hal yang sama terhadap dua kasus tersebut.

Kritik berikutnya dilontarkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburrohmah. Menurutnya, berdasarkan info yang dia dapat, dalam rekening yang diblokir tersebut terdapat rekening pribadi dan keluarga.

Rekening-rekening itu, kata dia, sama sekali tidak ada hubungannya dengan FPI. Oleh karena itu, ia mempertanyakan relevansi dari sikap PPATK yang mengumumkan ke publik terkait pemblokiran rekening FPI.

“Saya ingin tahu relevansinya apa. Karena info yang saya serap itu ada rekening-rekening pribadi, keluarga yang

sama sekali tidak ada hubungannya dengan organisasi itu. Tidak ada di akta tersebut. Ada menantu, ada anak,” ujarnya.

Menurutnya, dalam UU Ormas tidak ada ketentuan bahwa dana milik ormas yang dibekukan secara otomatis merupakan hasil kejahatan.

Apalagi berdasarkan laporan Bareskrim Polri tidak ada sama sekali tindak pidana yang ditemukan terkait rekening FPI. Untuk itu, politikus Partai Gerindra itu mendesak PPATK agar dapat menyelesaikan pemblokiran terhadap 92 rekening FPI.

Kritikan yang sama juga disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Santoso. Ia menilai, jika pemblokiran terus dilakukan oleh PPATK, maka akan timbul dugaan diskriminasi.

“Menurut saya ada diskriminasi yang dilakukan oleh PPATK, dan kalau adanya perlawanan dari masyarakat ya sangat wajar jadinya. Karena PPATK begitu diskriminatif, hanya mementingkan kekuasaan, tetapi tidak mementingkan keadilan, bagi masyarakat,” ungkapnya. ● han

katanya.

Menanggapi kritikan anggota dewan, Kepala PPATK Dian mengatakan, pengumuman pemblokiran rekening FPI dilakukan untuk meluruskan apa yang sudah terlanjur menyuarakan di media sosial.

“Cuma saja tidak pernah ada respons, tidak pernah ada reaksi dari yang diblokir. Tetapi ini kemudian menjadi di-blow-up di media sosial. Kemudian di berbagai media timbul apa namanya confused, kekecauan dan sebagainya kami akhirnya memutuskan untuk tujuan edukasi publik untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” jelas Dian.

Dian menegaskan bahwa pihaknya tak pernah mengurangi substansi ke publik seperti jumlah uang dan tujuan transfer dari 92 rekening tersebut. Dian berpendapat, pihaknya hanya menguraikan angka atau jumlah rekening yang diblokir.

“Kami tidak pernah men-disclose berapa jumlah uang, kepada siapa mentransfer dan sebagainya itu tidak pernah kami sampaikan sama sekali,” ungkapnya. ● han

Ingat! 31 Maret 2021 Batas Waktu Penyelenggara Negara Lapor LHKPN

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan, 31 Maret 2021 atau sekitar tujuh hari ke depan adalah batas waktu bagi penyelenggara negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020.

“Untuk itu, KPK mengimbau kepada penyelenggara negara yang belum melapor-

kan kekayaannya agar segera menyampaikan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3).

Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional, KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor atau 81,60 persen. Sisanya, masih ada 69.621 wajib lapor yang belum menyampaikan.

Rinciannya, kata Ipi, yakni pada bidang eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 wajib lapor yang telah melaporkan. Pada bidang yudikatif, tercatat 96,70 persen dari total 19.783 wajib lapor. Kemudian, pada bidang legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 wajib lapor dan dari BUMN atau BUMD tercatat 81,45 persen dari total 32.018 wajib lapor. ● mei



PEMERIKSAAN MANTAN STAFSUS MENTERI KKP SAFRI

Tersangka mantan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Safri, berjalan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/3). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka Safri dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

KPK Panggil 12 Saksi Kasus Suap Pengadaan Bansos Korona

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil 12 saksi terkait kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19, untuk wilayah Jabodetabek pada 2020.

“12 orang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso/Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/3).

Mereka yang dipanggil, yaitu Andreas dari pihak swasta/PT Putra Swarnabhumi; Rizal dari pihak swasta/PT Putra Bumi Phala Mandiri; Benedictus dari pihak swasta/PT Maju Gemilang Mandiri; M Iqbal dari pihak swasta/PT Total Abadi Solusindo; Ali Abulakan dari pihak swasta/PT Toima Jaya Bersama; Indriadi dari pihak swasta/PT Brahman Farm.

Kemudian, Yulianus dari pihak swasta/PT Inti Jasa Utama; Alida dari pihak swasta/PT Hohian Putra Jaya; Herson dari pihak swasta/PT Gosyen Sejahtera Utama; Rika Eka Sari dari pihak swasta/PT Rubi Convex; Rahmat Akmal dari pihak swasta/PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara; dan Henny Christiningsih dari pihak swasta/PT Sraya Dinamika Mandiri.

Selain Matheus Joko, KPK juga sedang melaku-

kan penyidikan untuk dua tersangka penerima suap lainnya, yaitu mantan Menteri Sosial Juliani Peter Batubara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial lainnya Adi Wahyono (AW).

Sementara pemberi suap adalah Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja yang saat ini sudah berstatus terdakwa.

Harry Van Sidabukke yang berprofesi sebagai konsultan hukum didakwa menyuap Juliani, Adi, dan Matheus sebesar Rp1,28 miliar karena membantu penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hemonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako Covid-19 sebanyak 1.519.256 paket.

Sedangkan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja didakwa menyuap Juliani, Adi, dan Matheus senilai Rp1,95 miliar karena menunjuk Ardian melalui PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket.

Atas perbuatannya, Harry dan Ardian dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. ● han

1.000 Bintara Otsus Papua Selesai Pendidikan Pertama

MAGELANG (IM) - Tangis haru keluarga mewarnai pelantikan Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier TNI AD Program Otonomi Khusus Putra dan Putri Asli Papua TA 2020 di Lapangan Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (23/3). Pendidikan pertama ini resmi ditutup oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto.

Sebanyak 1.000 putra dan putri terbaik Papua ini telah menjalani pendidikan selama 20 minggu dimulai sejak 4 November 2020 hingga 23 Maret 2021, dengan menyelesaikan semua materi dasar keprajuritan.

Sebanyak 1.000 putra dan putri asal Papua tersebut men-

jalani Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) Otonomi Khusus (Otsus) Orang Asli Papua (OAP) Kodam XVIII/Kasuari 2020.

Pria 960 terbagi di 4 Rindam jajaran TNI Angkatan Darat, Rindam III/Siliwangi 330 orang, Rindam IV/Diponegoro 240 orang, Rindam V/Brawijaya 260 orang, Rindam Jaya 130 orang dan 40 Wanita di Pusdik Kowad Bandung.

Dalam pendidikan di Rindam IV/Diponegoro ini terpilih sebagai lulusan terbaik adalah Serda Andry Kaoci putra dari Sem Kaoci yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Prajurit dengan nomor siswa 200002 tersebut berasal dari

Waisai, Raja Ampat, Papua Barat.

Dalam amanatnya, Pangdam IV/Diponegoro menekankan kepada para mantan prajurit siswa agar dapat menjadi Bintara yang tanggap, tanggon dan trengginas, berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat melaksanakan 8 Wajib TNI dalam kehidupan sehari-hari.

“Mulai hari ini kalian bukan lagi berstatus sebagai siswa, melainkan kalian adalah seorang prajurit yang terikat dengan norma dan aturan keprajuritan. Oleh karena itu kalian harus menjaga sikap dan perilaku dalam hidup bermasyarakat,” tegas Pangdam. ● mei



RAKER MENTERI PANRB DENGAN KOMISI II DPR

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji (kanan) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Hari Wibisana (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3). Rapat kerja tersebut membahas rekrutmen CPNS tahun 2021.

PENGUMUMAN

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan akta No. 74, Tgl 24-03-2021 dibuat dihadapan Yunita Arisnita, SH., Mkn. Notaris di Jakarta Utara, PKR PT. EMPAT PUTRI JANNATA berkedudukan di Kota Bekasi Memutuskan :

- Penerimaan laporan dan pertanggungjawaban hasil pembubaran;
- Penghapusan nama perseroan dari daftar perseroan;
- Menunjuk ARJUNA WALI sebagai likuidator.

Apabila terdapat kreditur atau pihak yang keberatan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pengumuman ini, ditujukan ke alamat : Jl. Masjid 3, Nomor 10 B6, RT. 003, RW. 002, Jaticempaka, Pondokgede, Bekasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 25 Maret 2021.
Likuidator

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Neraca Likuidasi yang telah disusun oleh likuidator PT. HALO SOLUSI UTAMA (dalam likuidasi "Perseroan") per tanggal 20 Maret 2021.

Perseroan tidak memiliki aset/kekayaan hasil likuidasi dan tidak ada sisa aset/kekayaan hasil likuidasi yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan.

Maka itu bagi pihak ketiga yang berkeberatan terhadap rencana pembagian harta kekayaan hasil likuidasi Perseroan sebagaimana tersebut di atas dapat menghubungi Ibu DEDEH KURNIASIH, selaku likuidator Perseroan di alamat Jl. Pluit Karang Jelita No.71, RT.8/RW.17, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung mulai pengumuman ini.

Jakarta, 25 Maret 2021
Likuidator Perseroan